

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi — 2

**Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap**

Rina Mediaswati dan Fajar Sidik — 4

**Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement
di Kota Pangkalpinang**

Aprizal dan Jon Roi Tua Purba — 15

**Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas
dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Erwinton Putra Antonius Tarigan dan Lastia Nurtanzila — 29

**Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan
Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
pada Era Otonomi Daerah**

Sri Sugiharta dan Tree Setiawan Pamungkas — 46

Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa

Sri Nurhidayati — 58

**Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional:
Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan**

Edison — 72

Indeks — 88

Panduan untuk Penulis — 90

Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap

Rina Mediaswati

Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap

rinaclp@yahoo.co.id

Fajar Sidik

Asisten Peneliti di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

el_sdk88@yahoo.com

Abstract

This article discusses the implementation of the Web based Employees' reporting application in the Regional Employees' Board in Cilacap District. The sub optimality of SIMPEG system, which is the system in use, makes the evaluation of the application important. To generate a detailed report of the implementation of the web based employees' reporting application in the realm of human resources management, the study used a mixed research methodology with in-depth interview serving as the qualitative technique and survei as the quantitative technique. Based on the results of the study, the implementation of the web-based employees' reporting application to support SIMPEG requires the existence of leadership commitment and sufficient budgetary support. Lack of supporting infrastructure in terms of sufficient technology and facilities remains a major obstacle. Meanwhile, based on measurement results on users of the application (HRD), obtained using Technology Acceptance Model (TAM), it was evident that the perception, interest, and behavior of users was very positive and supportive. This is attested by the magnitude of the variables with Performance Expectancy variable recording the highest average (4.29), and Image variable the lowest (3.32). Nonetheless, the existence of many employees with large workload in regional government units is a major obstacle that hampers the process of updating employees' data in the web-based system.

Key words: HRD, information system, Regional Employees' Board, Technology Acceptance Model (TAM)

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interview dan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk menggambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.

Kata Kunci: Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sistem informasi, sumber daya manusia (SDM), Technology Acceptance Model (TAM)

I. PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Cilacap menerapkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 34 ayat 2

UU tersebut adalah tentang penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Awalnya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan istilah SIMPEG. SIMPEG adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. *Business rules* atau aturan proses yang dijalankan di dalam SIMPEG mengacu kepada dasar-dasar peraturan kepegawaian.

Secara teknis, SIMPEG yang terdapat di BKD Kabupaten Cilacap dijalankan pada beberapa komputer di masing-masing bidang (*Client-Server*) yang terhubung dalam satu jaringan lokal atau *Local Area Network* (LAN). *Server* utama ada di Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian.

Seiring dilaksanakan kebijakan tersebut, karena ruang lingkup kerja yang begitu luas maka Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian BKD Cilacap berinisiatif untuk membuat aplikasi Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web. Aplikasi ini berbeda dengan SIMPEG. Jika SIMPEG dioperasikan oleh tiap-tiap bidang pada BKD Kabupaten Cilacap (dengan sistem *client server*) memakai jaringan LAN (*local area network*), maka Aplikasi Pelaporan Kepegawaian yang baru menggunakan *website* BKD Cilacap yaitu www.bkd.cilacapkab.go.id. Aplikasi inidioperasikan dan diinput secara online oleh masing-masing petugas kepegawaian di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara periodik yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap.

Perbaikan pelaporan data kepegawaian berbasis Web oleh BKD Kabupaten Cilacap dikarenakan sistem yang terdahulu (SIMPEG) belum efektif. Hasil observasi di lapangan oleh peneliti menunjukkan bahwa SIMPEG menjadi tidak optimal karena kurang dimanfaatkan dan dipakai oleh BKD sendiri. BKD dinilai hanya sebagai proyek titipan pemerintah.

Ketidakefektifan SIMPEG diperburuk dengan kondisi yang terjadi di SKPD. Bisa saja terjadi, SKPD yang bersangkutan pun tidak memiliki data Pegawai yang akurat, hal ini dapat menjadi fatal ketika dimintai data pegawai secara rahasia. Ditambah lagi PNS yang bersangkutan juga tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan perubahan status dinasnyanya. Sikapnya pasif dan hanya menunggu dimintai informasi oleh petugas kepegawaiannya. Kegagalan SIMPEG juga disebabkan oleh kurangnya kesiapan aparatur pemerintah. Perilaku penerima teknologi sistem informasi di masing-masing organisasi berbeda, baik dari segi persepsi maupun kemudahan penerimaan.

Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) difungsikan guna menunjang penyediaan *database* informasi kepegawaian di BKD Kabupaten Cilacap yang tepat, akurat, dan *update*. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dicoba digunakan peneliti sebagai pendekatan untuk menggambarkan tingkat penerimaan terhadap teknologi dengan tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Sebagai perbaikan sistem sebelumnya (SIMPEG) yang digunakan, maka kajian penerapan sistem informasi kepegawaian melalui web ini perlu dilakukan dan menarik untuk diteliti dari perspektif tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui lebih mendalam tentang sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut.

Tujuan penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web ini adalah meningkatkan kualitas dan sistem administrasi kepegawaian, mengembangkan *database* PNS yang memiliki tingkat otentikasi dan identifikasi tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat, meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi PNS, serta mempersingkat birokrasi kepegawaian dan meningkatkan pelayanan publik di Bidang Kepegawaian.

Dalam hal ini, agar dapat menggambarkan secara detail dan rinci hasil kajian yang dilakukan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam konteks ini yaitu bagaimanakah penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Cilacap dalam rangka pengembangan sistem administrasi manajemen kepegawaian untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat? Rumusan masalah itu mendeskripsikan dukungan dan kendala serta menganalisis penerimaan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web dari sisi pengguna (sumber daya manusia) dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi tujuan dalam kajian penelitian ini.

Hasil penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis Web pada BKD di Kab. Cilacap dideskripsikan dan dijelaskan secara lebih komprehensif melalui pendekatan

Mixed method research yang digunakan. Dalam aplikasinya, pendekatan kuantitatif digunakan survai melalui instrumen evaluatif formatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati agar penerapan APK berbasis web dilakukan secara lebih mendalam. Dalam proses pengumpulan data, observasi dilakukan dengan mengamati sendiri secara langsung mengenai penerapan APK berbasis web mengenai proses manajemen data kepegawaian berlangsung.

Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi lebih mendalam guna mengetahui penyebab kurang optimalnya Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web kepada para informan penelitian. Kuesioner digunakan untuk penilaian para petugas kepegawaian yang mengoperatori Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Cilacap yang berjumlah 225 orang. Untuk analisa data dilakukan dengan teknik reduksi data dan display data. Sedangkan, uji keabsahan data menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas. Dari proses yang dilakukan tersebut, kesimpulan dapat diambil guna menjawab pertanyaan penelitian.

II. TINJAUAN TEORI

II.1 Peran E-Government dalam Sistem Informasi Kepegawian

Berdasarkan definisi *World Bank*, *e-Government* yang juga disebut *e-Gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa penerapan *e-Government* melalui APK berbasis web sebagai pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan menggunakan jaringan internet bertujuan pada perbaikan dan peningkatan pelayanan

kepegawaian. Dalam pada itu, penerapan *e-Government* merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Pada kajian ini penerapan *e-Government* diimplementasikan melalui Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web yang ditujukan untuk mengelola data Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini sejalan dengan konsep bentuk relasi *Government to Employees*.

Hermawan Kartajaya *et. al.* (2002: 330-331) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan dalam pengembangan layanan *e-Government*, sebagai berikut (a) Tahap 1 yaitu dengan menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet) juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah. (b) Tahap 2 yaitu aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (*online*), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara *offline*, publik dapat memantau kinerja secara online. (c) Tahap 3 yaitu aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).

Sementara itu, pada penerapan *e-Government* terdapat beberapa indikator penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya. Menurut Heeks (2001b: 17-19), kesiapan menuju keberhasilan *e-Government* berkaitan dengan: (1) *Is the Data Systems Infrastructure Ready?*; (2) *Is the Legal Infrastructure Ready?*; (3) *Is the Institutional Infrastructure Ready?*; (4) *Is the Human Infrastructure Ready?*; (5) *Is the Technological Infrastructure Ready?*; (6) *Is the Leadership and Strategic Thinking Ready?*

Dari enam persyaratan tersebut, Heeks berfokus pada empat syarat yang penting, yaitu: (1) Infrastruktur legal/hukum: perlu ada perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi, dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah; (2) Infrastruktur kelembagaan: *e-Government* tidak hanya terbatas pada publikasi informasi, maka suatu instansi layanan informasi daerah

tidaklah cukup dan instansi tersebut nantinya perlu dikembangkan menjadi suatu instansi yang menangani *e-Government* dalam tingkatan yang juga memberi layanan transaksi digital; (3) Infrastruktur SDM: sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas profesional dalam bidang ICT untuk ikut berkiprah dalam *e-Government* milik pemerintah (selain itu perludimungkinkan layanan *e-Government* yang dilakukan oleh swasta); dan (4) Infrastruktur teknologi: meskipun teknologi yang diperlukan relatif mahal, tapi peluang kerja sama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-Government*.

Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis web pada BKD Kabupaten Cilacap merupakan salah satu strategi inovasi organisasi dalam peningkatan dan pengembangan manajemen kepegawaian. APK merupakan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.

Hal tersebut merupakan prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, memvalidasi data yang dibutuhkan oleh organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, dan karakteristik unit organisasi. SIM-SDM memungkinkan organisasi menyimpan data persediaan keahlian-keahlian (*skill inventory*) sesuai dengan kebutuhan SDM (Marimin *et. al.*, 2006-45). Aplikasi sistem informasi SDM mempunyai peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui tersedianya informasi sumber daya manusia yang cepat, lengkap dan akurat.

Nilai strategis dan pentingnya informasi mengenai kepegawaian ini antara lain karena pegawai adalah penentu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan demikian kinerja organisasi akan sangat bergantung pada individu pegawai sebagai pekerja. Penempatan pegawai harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kriteria yang rasional. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia tidak dapat diimplementasikan secara utuh tanpa dukungan dari SDM sebagai pengguna.

Para pengguna memiliki peran sebagai pengontrol dan penguji atas kualitas sistem yang dibangun. Pada saat mereka menggunakan dan mengoperasikan sistem, mereka akan menilai apakah sistem tersebut sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka atau belum.

Kelancaran proses pengembangan manajemen kepegawaian di sektor publik tidak terlepas dari efisiensi dalam bidang administrasi kepegawaian. Pengintegrasian teknologi informasi menggerakkan dan mendorong percepatan terwujudnya *database* yang akurat dan mutakhir dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengolahan data di bidang kepegawaian (Kuspriyomurdono, 2011).

Beberapa contoh kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan PNS, karier, pemindahan (mutasi), pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Dalam pada itu, tentunya memerlukan sistem *database* kepegawaian yang tepat, akurat dan *update*. Sistem Web diinisiasikan sebagai pendekatan dalam penyajian data kepegawaian yang dimaksud.

Dengan demikian tujuan utama dari pembangunan dan pengembangan sistem informasi melalui sistem *e-Government* salah satunya dengan basis Web dalam suatu organisasi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu melaksanakan aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari secara baik dan terintegrasi, efektif dan efisien, serta akurat dan *update* dalam menyajikan data dan informasi yang lebih berkualitas dalam manajemen kepegawaian maupun dalam Aplikasi Pelaporan Kepegawaian.

II.2 Technology Acceptance Model (TAM), Pendekatan Teori dalam Penilaian Sikap Pengguna APK Berbasis Web

Teori mengenai penerimaan teknologi informasi ada berbagai macam, yaitu TRA (*Theory of Reasoned Action*), TPB (*Theory of Planned Behaviour*) dan yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah TAM (*Theory Acceptance Model*). Serta model gabungan penerimaan teknologi UTAUT (*Unified Theory of Accepting and Using Technology*). Dalam konteks ini, teori TAM dijadikan sebagai model evaluasi. TAM adalah model yang menggambarkan tingkat penerimaan terhadap teknologi dengan tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction*). TAM pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 oleh Davis *et. al*, seperti gambar di samping.

TAM mengeluarkan konstruk sikap (*attitude*) untuk membuat model lebih sederhana untuk menjelaskan niat (*intention*) dengan lebih baik. Beberapa variabel konstruk yang mungkin saja terjadi dalam penerimaan sistem teknologi informasi adalah *attitude, behavioral intention, computer anxiety, computer playfulness, computer self-efficacy, image, job relevance, objective usability, output quality, perceived ease of use, perceived enjoyment, perceived usefulness, perception of external control, result demonstrability, subjective norm* dan *voluntariness* serta *actual usage* dan variabel konstruk lain seperti *effort expectancy, facilitating conditions, performance expectancy*, dan *social influence*. Variabel-variabel ini juga biasanya dipergunakan dalam model gabungan penerimaan dan penggunaan UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*).

Menurut Jogiyanto (2011: 134) ada beberapa alasan kajian evaluasi penerimaan sistem informasi menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*), di antaranya adalah sebagai berikut: (1) TAM merupakan model perilaku (*behavior*) yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak

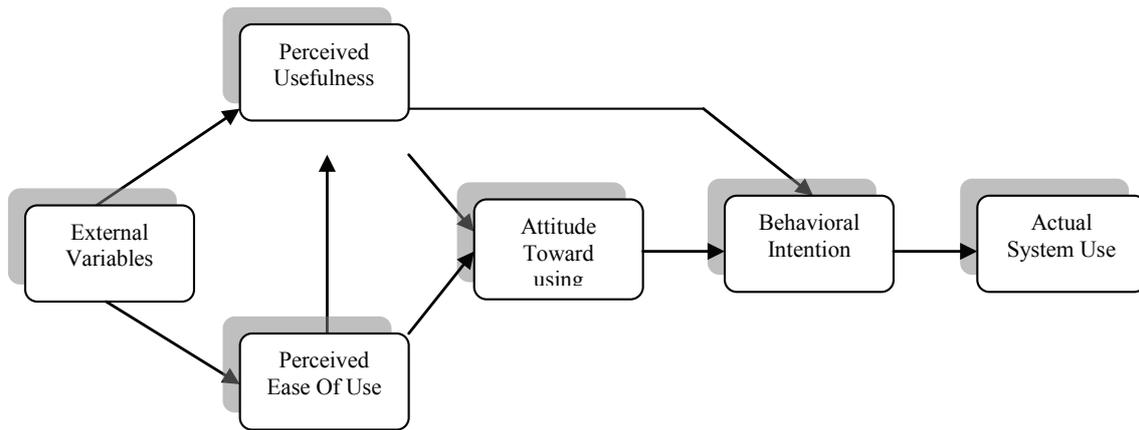


Diagram 1 Model TAM (1) Davis, *et. al.* (1989)
 Sumber: Jogiyanto (2011: 124)

sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai minat (*intention*) untuk menggunakannya; (2) TAM secara lebih terinci menjelaskan penerimaan TI dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat memengaruhi dengan mudah diterimanya TI oleh penggunanya (*user*); (3) TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik, dan (4) TAM merupakan model yang parsimoni, yaitu model yang sederhana tetapi valid.

TAM digunakan untuk menjelaskan sifat perilaku dan faktor-faktor penentu penerimaan sistem informasi maupun teknologi informasi. TAM merupakan salah satu model yang terbukti secara empiris memiliki validitas yang tinggi (Chau, 1996). Sedangkan tujuan dari model TAM tersebut menurut perancangannya (Davis, 1989) menyatakan bahwa TAM memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor penentu penerimaan komputer yang bersifat umum, yang mampu menjelaskan perilaku pengguna pada penggunaan akhir teknologi komputasi dan di berbagai populasi pengguna, sementara pada saat yang sama bersifat efisien dan teoritis dibenarkan.

Dalam studi penerimaan teknologi, dikenal adanya sistem informasi keperilaku. Pada sistem ini, perilaku manusia dikaji

untuk mengetahui persepsi pengguna dalam menggunakan dan memanfaatkan suatu teknologi informasi (Chau, 1996). Dengan dasar tersebut, TAM dijadikan sebagai pendekatan teori untuk melakukan evaluasi para pengguna aplikasi berbasis Web pada BKD di Kab. Cilacap.

III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Hasil Analisis Penerapan APK Berbasis Web

Hasil analisis kajian penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis *web* terdapat empat faktor yang melandasi pembahasan sekaligus sebagai batasan dalam kajian penelitian ini, yaitu:

1. Pemikiran pemimpin dalam manajemen data Pegawai Negeri Sipil di BKD Cilacap. Beberapa pendapat pejabat BKD Kabupaten Cilacap mengenai pentingnya manajemen data kepegawaian menunjukkan pengetahuan dan pemikiran pemimpin tentang bagaimana mengedepankan peran pentingnya data pegawai dalam arus birokrasi pemerintahan. Adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengembangan manajemen data pegawai mencerminkan kepemimpinan yang baik.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menciptakan suatu sistem pengelolaan data kepegawaian yang siap dan kapan saja disajikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dibidang kepegawaian yaitu sistem informasi APK berbasis *web*.

2. Kondisi sistem manajemen data PNS di BKD Cilacap yang diperlukan dalam mengelola manajemen data Pegawai Negeri Sipil di BKD Cilacap. Kondisi sistem data melalui APK berbasis *web* cukup memadai dan memiliki tujuan yang jelas. Karena APK berbasis *web* lahir dari operasionalisasi SIMPEG yang belum optimal yang dimaksudkan untuk memutakhirkan data pegawai secara *online*.

Namun dalam kegiatan manajemen data di BKD, SIMPEG masih tetap dipergunakan bersama-sama dengan APK. Pengelolaan aplikasi sistem informasi yang ada di BKD Cilacap diharapkan dapat selalu menyajikan data seakurat mungkin dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan kelancaran birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

3. Ketersediaan dasar hukum manajemen *database* kepegawaian BKD Cilacap. Dalam melaksanakan pengadaan sistem informasi di BKD Kabupaten Cilacap, Bidang informasi dan Pelayanan Kepegawaian melaksanakan kegiatan tersebut dengan berdasar pada peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan di atas merupakan kebijakan pusat yang masih bersifat umum, sedangkan yang bersifat teknis di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap belum ada, hanya tercakup dalam *blue print e-Government* Kabupaten Cilacap. Ketika ditelusuri mengenai adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang

terkait dengan penerapan *e-Government* di Kabupaten Cilacap di Bagian Hukum Setda Cilacap, namun landasan hukum di daerah mengenai hal tersebut tidak ada.

4. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi APK berbasis *web*. Suatu sistem manajemen data memungkinkan sebuah instansi pemerintah daerah dalam menciptakan *database*, meremajakan atau memutakhirkan *database*, memilih, mencari kembali dan menyortir data serta berfungsi untuk menyediakan laporan sesuai dengan kebutuhan.

APK dan SIMPEG merupakan dua aplikasi yang berbeda secara penanganan *database*. SIMPEG adalah aplikasi yang dikelola oleh BKD, *database* jelas berasal dari semua perubahan data yang ada di mutasi kepegawaian BKD. SIMPEG mempunyai satu buah komputer yang berfungsi sebagai *database server* dengan manajemen data menggunakan *SQL server*, sedangkan manajemen data APK yang merupakan aplikasi dengan rekayasa *web* menggunakan manajemen *database mySQL*.

Hal tersebut menjadi satu kendala yang menjadi penyebab belum optimalnya APK jika dikaitkan dengan SIMPEG terlebih menyangkut data PNS adalah belum adanya *converter* kedua aplikasi tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pemikiran pemimpin yang telah dijelaskan didepan bahwa perencanaan setiap program kegiatan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan *output* yang optimal.

III.2 Hasil Analisis Sikap Pengguna APK Berbasis Web

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis *web* pada BKD di Kab. Cilacap antara lain:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis *web* pada BKD di Kab. Cilacap di

antaranya; (a) Pemikiran dan komitmen pemimpin dalam meningkatkan penyajian data kepegawaian yang akurat yang diwujudkan melalui APK berbasis *web*; (b) Keamanan sistem manajemen data karena di bawah tanggung jawab *server* yaitu Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Cilacap; (c) Ketersediaan dasar hukum yang jelas dalam APK berbasis *web* yaitu I *e-Government* Cilacap yang menjadi landasan operasionalnya; dan (d) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai karena aparaturnya yang ditugasi sebagai operator APK berbasis *web* sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup serta secara personal, penilaian penerimaan user terhadap APK berbasis *web* sudah baik. Hal ini dapat ditunjukkan secara keseluruhan nilai rerata tertinggi diperoleh dari pengukuran variabel *Performance Expectancy* sebesar 4, 29.

2. Faktor Penghambat

Faktor kendala terkait dengan faktor sumber daya manusia dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis *web* pada BKD di Kab. Cilacap yaitu (a) Masih banyak *user* APK berbasis *web* yang mempunyai tugas rangkap sehingga beban kerja (*work load*) yang diterima pun banyak; (b) Sebanyak 69 orang operator atau *user* dari APK berstatus non-PNS terdiri dari tenaga harian kontrak dan tenaga wiyata bakti dalam APK yang tersaji tidak mencakup data diri dan keberadaannya; dan (c) User pada SKPD yang memiliki UPT atau data pegawai yang banyak (seperti Disdikpora dan Dinkes) kesulitan untuk meng-*update* data dibandingkan dengan I dengan jumlah nominal pegawai sedikit. Sedangkan, pada ketersediaan infrastruktur teknologi yaitu (a) Sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di tiap SKPD tidak sama; dan (b) Kesulitan mengintegrasikan APK berbasis *web* dengan SIMPEG karena BKD belum memiliki *converter* kedua aplikasi tersebut sehingga pengerjaannya masih secara manual.

Faktor sumber daya manusia memang merupakan pengembang, pengelola dan sekaligus sebagai pengguna Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis *web*. SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kebijakan *e-Government* melalui APK. Beban kerja yang terlalu banyak turut memengaruhi kinerja *entry* data pegawai di APK. Selain itu banyaknya pegawai yang datanya harus diperbarui juga merupakan kendala bagi *user* yang berada di dinas-dinas besar.

Faktor status kepegawaian juga berpengaruh pada psikologis SDM yang bersangkutan, karena bagi seorang pegawai, bekerja merupakan suatu bentuk aktualisasi bagi kemampuan dan keberadaan dirinya. Di satu sisi dia harus mengerjakan data pegawai PNS melalui APK, namun data dan informasi yang tersaji dalam APK tersebut tidak mencakup data diri dan keberadaannya. Hal ini bisa mengubah persepsi yang bersangkutan terhadap aplikasi tersebut.

Sementara itu, penerimaan *user* dalam hal ini adalah petugas operator Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis *web* di lingkungan Kabupaten Cilacap terhadap penggunaan aplikasi tersebut dilihat dari beberapa faktor variabel konstruk (Venkatesh and Bala, 2008) di antaranya *attitude, behavioral intention, computer anxiety, computer playfulness, computer self-efficacy, image, job relevance, objective usability, output quality, perceived ease of use, perceived enjoyment, perceived usefulness, perception of external control, result demonstrability, subjective norm* dan *voluntariness* serta *actual usage* dan variabel konstruk lain seperti *effort expectancy, facilitating conditions, performance expectancy* dan *social influence* digunakan sebagai indikator penilaiannya.

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diperoleh sebanyak 208 orang dari 225 orang operator APK, dengan tingkat presentase sebesar 92,44% diperoleh hasil kajian dari 21 variabel *Technology Acceptance Model* yang digunakan dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis *web* pada

BKD di Kab. Cilacap menunjukkan bahwa nilai rerata tertinggi diperoleh dari pengukuran variabel *Performance Expectancy* sebesar 4,29. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis *web* bermanfaat bagi pekerjaan para responden yang sebagian besar juga merangkap sebagai petugas kepegawaian.

Responden percaya, menggunakan APK berbasis *web* akan membantunya mendapatkan keuntungan-keuntungan kinerja dalam pekerjaannya. Salah satu pernyataan responden mengenai hal ini adalah APK amat sangat memudahkan baginya dalam membuat laporan kepegawaian, memberi kelancaran serta memudahkan pengecekan data kepegawaian. Sedangkan nilai rerata terendah diperoleh dari pengukuran variabel *Image* sebesar 3,32.

Angka itu sebenarnya masih cukup tinggi (*mean* observasi > *mean* hipotetik) yang berarti responden masih menganggap *image* (persepsi mengenai imej dalam penggunaan APK berbasis *web*) sebagai bagian yang baik dalam pemanfaatan teknologi informasi, namun bukan hal yang sangat penting diperhitungkan dibandingkan dengan variabel lainnya sehingga dari penilaian kategorisasi hasil kuesioner masuk dalam kategori kurang baik dalam penerimaan responden terhadap Aplikasi Pelaporan Kepegawaian.

IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi penerimaan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis *web* di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap, maka dapat ditarik beberapa simpulan.

Pertama, terdapat faktor pendukung penerimaan APK Berbasis *Web*, di antaranya; (a) Pemikiran dan komitmen pemimpin dalam meningkatkan penyajian data kepegawaian yang akurat yang diwujudkan melalui APK berbasis *web*; (b) Keamanan sistem manajemen data

karena di bawah tanggung jawab *server* yaitu Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Cilacap; (c) Ketersediaan dasar hukum yang jelas dalam APK berbasis *web* yaitu *blue-print e-Government* Cilacap yang menjadi landasan operasionalnya; dan (d) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai karena aparatur yang ditugasi sebagai operator APK berbasis *web* sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup serta secara personal, penilaian penerimaan *user* terhadap APK berbasis *web* sudah baik. Hal ini dapat ditunjukkan secara keseluruhan nilai rerata tertinggi diperoleh dari pengukuran variabel *Performance Expectancy* sebesar 4,29.

Kedua, hal yang menjadi kendala umumnya berhubungan dengan faktor sumber daya manusia yaitu: (a) Masih banyak user APK berbasis *web* yang mempunyai tugas rangkap sehingga beban kerja (*work load*) yang diterima pun banyak; (b) Sebanyak 69 orang operator atau user dari APK berstatus non-PNS terdiri dari tenaga harian kontrak dan tenaga wiyata bakti dalam APK yang tersaji tidak mencakup data diri dan keberadaanya; dan (c) User pada SKPD yang memiliki UPT atau data pegawai yang banyak (seperti Disdikpora dan Dinkes) kesulitan untuk meng-*update* data dibandingkan dengan *user* dengan jumlah nominal pegawai sedikit. Sedangkan, pada ketersediaan infrastruktur teknologi yaitu; (a) Sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di tiap SKPD tidak sama; dan (b) Kesulitan mensinkronisasi APK berbasis *web* dengan SIMPEG karena BKD belum memiliki *converter* kedua aplikasi tersebut sehingga pengerjaannya masih secara manual.

IV.2 Saran

Agar penerapan kebijakan manajemen data kepegawaian melalui Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis *web* di Kabupaten Cilacap, maka yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perbaiki kondisi fasilitas yang ada di tiap SKPD agar lebih diinovasi pada tampilan antar muka (*user interface*) sehingga tidak membosankan pengguna, fitur pesan yang terbalas/cepat dibalas, minimalis *double entry* pada input SK dan biodata, *export* data ke *Excel* agar bisa digunakan juga untuk kebutuhan SKPD dan lain sebagainya terkait dengan persepsi pengguna.
2. Perlu adanya pembagian kerja secara tegas dalam tiap SKPD sehingga uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai jelas. Sehingga tidak ada lagi user yang memiliki beban kerja sangat banyak (*over load*) atau sangat sedikit (*under load*).
3. Perlu adanya pelatihan yang berkala dan kontinu mengenai Aplikasi Pelaporan Kepegawaian berbasis *web*. Baik mengenai teknis operasionalnya maupun pemahaman mengenai bahwa data yang diolah memang hanya data Pegawai Negeri Sipil dan bukan Non-PNS. Sehingga user yang statusnya non-PNS tidak menuntut agar data pegawai non-PNS dimasukkan dalam fitur APK.
4. Perlu perencanaan yang baik mengenai infrastruktur teknologi. Bahwa untuk mensinkronkan data kepegawaian dari aplikasi berbasis *web* ke aplikasi sistem *desktop* seperti APK berbasis *web* ke SIMPEG dibutuhkan converter yang akan memudahkan petugas dalam mengecek kebenaran data pegawai.
5. Untuk meningkatkan performansi BKD Kabupaten Cilacap selaku dinas pengelola APK berbasis *web*, perlu koordinasi dengan SKPD terkait mengenai kesiapan penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang kurang memadai di SKPD dengan kondisi geografis yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Agusta. 2011. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Kios 3 in 1 Dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan User Satisfaction: Studi Kasus di BLKI Semarang. *Tesis*. Magister Teknologi Informasi UGM. Yogyakarta.
- Chau, Patrick Y. K. 1996. An Empirical Assessment of a Modified Technology Acceptance Reviewed Work(s). *Journal of Management Information Systems* 13(2): 185-204. <http://www.jstor.org/stable/40398221>. 6 Juni 2012 (13:58).
- Heeks, Richard. 2001. *Understanding e-Governance for Development*. Government Working Paper Series. Institute for Development Policy and Management University of Manchester. Manchester, UK. http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig.
- Handy, Natali. 2011. Analisis Kegagalan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. 9 Juni 2003. Jakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang *Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika Di Indonesia*. 24 April 2001. Jakarta.
- Jogiyanto, H. M. 2005. *Sistem Teknologi Informasi, Edisi II, Pendekatan Terintegrasi; Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kartajaya, Hermawan, M. Hermawan, Yuswohady, Taufik, Sonni, H. Anwar, H.H. Joewono, J. Mussry. 2002. *MarkPlus on Strategy*. PT Gramedia. Jakarta.

- Kuspriyomurdono. 2011. Pembinaan Internal, Kunci Kemajuan BKN. *Buletin Badan Kepegawaian Negara*. Edisi XV. Februari 2011.
- Marimin, Tanjung H., dan Prabowo H. 2006. *Sistem Informasi Sumber Daya Manusia*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Meila Wati, Renni. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Penggunaan ATM (Studi Kasus Pada Nasabah Pengguna ATM BRI di Maospati Magetan). *Tesis*. S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan UGM. Yogyakarta.
- Nasir. 2011. Analisis dan Evaluasi User Acceptance Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada E-Procurement di Kabupaten Kebumen. *Tesis*. Magister Teknologi Informasi UGM. Yogyakarta.
- Shidiq, Hakim. 2009. Evaluasi Tingkat Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Tesis*. Magister Teknologi Informasi UGM. Yogyakarta.
- Sumaryono. 2012. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. *Tesis*. S2 Kesehatan Masyarakat/EL UGM. Yogyakarta.
- Venkatesh, V., and Bala, H. 2008. Technology Adoption Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Decision Sciences* 39(2): 273-315.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. 21 April 2008. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. 30 April 2008. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *Pokok-Pokok Kepegawaian*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. 30 September 1999. Jakarta.

PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
 - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.
Contoh:
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
 - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh:
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
 - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
 - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.
Contoh:
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.

KETENTUAN BERLANGGANAN

Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi pelanggan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). JKAP terbit dua kali setahun dengan harga satuan Rp40.000,- (belum ongkos kirim).

Hubungi kami di (0274) 563825, isi dan fax form di bawah ini beserta bukti pembayaran ke (0274) 589655 atau kirim melalui e-mail ke igpa@ugm.ac.id. Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. 1370092054119.

Paket Langganan	Harga Langganan Pulau Jawa	Harga Langganan Luar Pulau Jawa
1 tahun	Rp80.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp80.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun	Rp160.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp160.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun	Rp320.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp320.000,- (diskon ongkos kirim 50%)

YA, SAYA MAU MENJADI PELANGGAN JKAP

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
Telepon : (Rumah)
(Kantor)

PESAN SEKARANG

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 1370092054119

Dari Bank :
No. Rekening :
Tgl/bln/thn :